

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas – batas negara. “Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita dan Yani, 2005:3). Menurut Mohtar Mas’oed, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang melibatkan bangsa-bangsa yang berdaulat sehingga diperlukannya mekanisme yang kompleks dan melibatkan banyak negara.

Seiring berkembangnya sistem suatu negara, relevansi Ilmu Hubungan Internasional dengan disiplin ilmu lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, geografi, psikologi, budaya dan lainnya tentu sangatlah penting. Hal ini diperlukan karena hubungan internasional berusaha untuk menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional yang positif dan tentunya akan melibatkan negara yang berbeda-beda, sehingga hubungan antara studi ini dengan disiplin ilmu lainnya tidak dapat dipisahkan.

Krisis Politik merupakan masalah yang mengakibatkan kejadian dimana pemerintahan tidak dapat menjalankan pemerintahan dengan baik yang diakibatkan oleh masalah politik seperti krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah mementingkan kepentingan pribadi atau partai. Suatu negara tentunya tidak akan selamanya sejahtera, akan ada masanya dimana negara tersebut mengalami sebuah krisis dalam bidang apapun, salah satunya adalah krisis di bidang politik. (brainly, diakses pada 12 desember 2019).

Krisis yang terjadi di Venezuela dapat dilihat dari kondisi ekonomi, Sosial, dan Politik yang buruk. Krisis telah terjadi pada era pemerintahan Hugo Chavez dengan turunnya pemerataan dan pendapatan negara yang dikarenakan oleh kebijakan devaluasi mata uang yang dilakukan secara teratur, dan penurunan harga minyak dunia, Pemerintah diharuskan untuk mengurangi anggaran belanja sosial yang selama ini menyangga hampir semua sektor kesejahteraan seperti sektor perumahan bagi rakyat venezuela. Kelangkaan komoditas kebutuhan primer maupun sekunder menjadi fenomena yang ditemui di Venezuela hingga masa pemerintahan Nicholas Maduro yang naik menjadi Presiden venezuela tahun 2013.

Harga-harga kebutuhan pokok masyarakat Venezuela melambung jauh dari pendapatan masyarakatnya, angka pengangguran meningkat tajam, dan terjadi hiperinflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diperkirakan sekitar 4 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya menjadi imigran gelap di negara-negara tetangga. (cartercenter.org, diakses pada 1 maret 2020). Di tengah krisis yang tersebut, Nicolas Maduro berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan

memperoleh 67,7 persen suara, sementara di posisi kedua Henri Falcon, memperoleh 21,2 persen suara. Sedangkan di posisi ketiga ada Javier Bertucci sekitar 11 persen suara, yang diadakan 20 Mei 2018 dari total (AFP.com, diakses pada 29 Februari 2020). Dan Nicholas Maduro resmi dilantik sebagai presiden Venezuela pada 19 Januari 2019. Akan tetapi, Kelompok oposisi Henri Falcon melakukan protes keras pada hasil pemilu yang dinilai tidak sah dan sempat memboikot tempat pemungutan suara di Venezuela pun diguncang unjuk rasa dan protes dari rakyat yang mendukung kelompok oposisi. (mediaindonesia.com, diakses pada 29 Februari 2020).

Pada 10 Januari 2019, Majelis Nasional Venezuela, yang mayoritas terdiri dari koalisi kelompok oposisi, menyatakan bahwa hasil pemilu tidak sah dan mengangkat Juan Guaido sebagai penjabat presiden, berdasarkan klausul Konstitusi Venezuela tahun 1999 yang disahkan oleh mantan presiden Hugo Chavez. Dan mendapat respon dari Mahkamah Agung yang ditugaskan Nicholas Maduro dengan menyebut pernyataan oleh Majelis nasional koalisi kelompok oposisi tidaklah konstitusional. Meski begitu, Juan Guaido tetap resmi dilantik menjadi ketua Majelis Nasional Venezuela dan menyatakan bahwa dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pada 23 Januari 2019, dengan maksud untuk memimpin masa transisi pemerintahan sampai pemilihan berikutnya. Juan Guaido meminta konstitusi untuk menjadi presiden sementara, dengan alasan bahwa terpilihnya Nicholas Maduro pada pemilihan presiden tahun 2018 tidak sah dan mengajak (reuters.com, diakses pada 12 Oktober 2019).

Juan Guaido mengklaim sebagai Pelaksana Tugas Presiden yang konstitusional setelah Majelis Nasional menyatakan posisi kepresidenan dalam kondisi “kosong” berdasarkan Pasal 233 konstitusi Venezuela tahun 1999, yang memungkinkan diangkatnya pelaksana tugas presiden untuk menggantikan pejabat presiden “setelah meninggalkan jabatannya, sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Nasional”. Juan Guaido menyatakan aksinya sebagai langkah yang sesuai dengan hukum untuk keluar dari krisis ekonomi dan politik negara itu, Setelah menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido menyanggah legitimasi kekuasaan Nicholas Maduro dan menyatakan jabatan presiden kosong. Krisis politik di Venezuela mendapat atensi luar biasa dari dunia internasional, Juan Guaido mendapatkan dukungan dari negara- negara seperti Brazil, Argentina, Chili, Jerman, Kanada, termasuk Amerika Serikat.

Ketertarikan dunia internasional untuk turut terjun dalam krisis politik yang terjadi di Venezuela tak lain menasar pada kekayaan sumber daya alam yaitu sektor minyak bumi Venezuela sekitar 300 miliar barrel (cnn indonesia, diakses pada 13 desember 2019). Di tengah krisis, China, dan Rusia sudah terlebih dulu berkerjasama dengan venezuela pada tahun 2012 ketika pemerintahan masih dipimpin oleh Hugo chavez dan diteruskan oleh Nicholas Maduro, dalam sektor pinjaman luar negeri sekitar US\$150 juta. Dan sejak Nicholas Maduro menjabat sebagai presiden di 2014, Pemerintah Venezuela telah membayar utang luar negerinya sebesar US\$ 71,7 juta beserta bunganya (bbc.com, diakses pada 2 maret 2020). Besarnya jumlah hutang Venezuela ke Rusia dan china membuat kedua negara itu mendapatkan keuntungan dalam

mendapatkan minyak bumi dari Venezuela. Venezuela sangat membutuhkan suntikan bantuan dana dari Rusia dan China, sama besarnya seperti kedua negara itu membutuhkan minyak bumi. Venezuela tercatat masih memiliki hutang luar negeri sebesar 20 miliar dolar AS (Rp 281 triliun) kepada China dan berutang sebesar 2,3 miliar dolar AS (Rp30 triliun) kepada perusahaan minyak Rusia (Rosneft, 2018), dibawah kekuasaan pemerintahan Nicholas Maduro yang menutup kerjasama dengan investor asing kecuali China, Rusia, Kuba, Meksiko, dan Turki

Kebijakan Maduro tentunya berbeda dengan Kelompok Oposisi. Menurut Carlos Veccio, Perwakilan dari kelompok oposisi dan juga aktivis sosial di Venezuela, Juan Guaido ingin meningkatkan produksi minyak dan membatalkan persyaratan saat ini bahwa raksasa minyak milik negara PDVSA harus mempertahankan saham pengendali dalam usaha patungan. Saat ini, PDVSA diketahui harus mempertahankan 51 persen saham dalam proyek bersama (money.kompas.com diakses pada 2 Januari 2020). Venezuela dinilai akan menuju fase ekonomi yang terbuka, dan meningkatkan produksi minyak yang mayoritas akan di pegang oleh swasta. Kebijakan tersebut mendorong negara negara asing untuk mendukung Venezuela di bawah Kekuasaan Juan Guaido, Termasuk Amerika serikat yang paling vocal dalam memberi dukungan terhadap Juan Guaido.

Ketertarikan amerika serikat diakui oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, yaitu dengan memberikan dukungan terhadap Juan Guaido dan untuk memberikan kudeta terhadap Nicholas Maduro mengenai cadangan minyak

di Venezuela. Amerika Serikat bertaruh banyak di tengah krisis politik Venezuela, secara khusus menyebut sumber daya minyak negara tersebut dan keuntungan ekonomi bagi AS. Kebijakan ini akan membuat perbedaan besar bagi Amerika Serikat secara ekonomi apabila terdapat permintaan dari perusahaan minyak Amerika untuk berinvestasi dan menghasilkan sumber daya minyak di Venezuela. Menyingkirkan Nicholas Maduro dari kekuasaan sangatlah penting karena Maduro dinilai membuat negara-negara yang memusuhi Amerika mendukungnya, dan menyingkirkan Nicholas Maduro dari kekuasaan akan menjadi langkah besar dan potensial untuk membuka peluang “bisnis” di wilayah Venezuela. Kekayaan sumber alam Venezuela menjadi suatu ketertarikan bagi AS. Presiden AS Donald Trump sendiri memiliki sejarah memperjuangkan perubahan rezim di negara-negara kaya minyak di seluruh dunia asalkan perusahaan-perusahaan AS diuntungkan.

Dalam upaya untuk meningkatkan peran, Amerika Serikat dengan mempromosikan nilai liberalisme adalah suatu langkah strategis yang harus dilakukan AS. Dalam melakukan hal tersebut, Amerika Serikat masih akan menghadapi berbagai masalah perbedaan dalam sistem politik, ekonomi, sosiologis, budaya dan sejarah. Hal ini menjadi lebih kompleks dalam hubungan internasional menyangkut pengaturan lintas batas. Liberalisme politik (demokrasi liberal) dianggap telah membuat kemajuan besar diseluruh bagian dunia, kecenderungan umum ini juga akan dilakukan dibawah rezim baru pemerintahan Venezuela.

Intervensi AS dalam politik domestik Venezuela bertujuan untuk menyingkirkan seorang pemimpin “otoriter” dan melindungi demokrasi dan hak asasi manusia. Amerika Serikat atau biasa disingkat sebagai AS, memberi atensi lebih terhadap krisis politik di Venezuela, Amerika Serikat yang merupakan sebuah negara yang dikenal sebagai negara adidaya dan meng-*claim* bahwa menyebarkan demokrasi berarti memperluas perdamaian (Jack Snyder, 2000). Hal ini merujuk pada sebuah esai yang dikemukakan oleh filsuf asal Jerman yaitu Immanuel Kant yang diberi judul *Perpetual Peace* pada tahun 1795.

Esai tersebut berisi negara-negara republik tidak akan saling berperang satu sama lain, mengingat hal tersebut presiden-presiden terdahulu Amerika Serikat kemudian berpendapat bahwa dukungan terhadap demokratisasi akan mencegah perang antar-negara. Hal ini terbukti dengan usahanya untuk selalu mempengaruhi negara lain terutama negara miskin dan berkembang untuk masuk dalam cakupan kekuasaannya baik secara politik dan ekonomi. Kebijakan luar negeri AS di era Pasca berakhirnya Perang Dunia ke II, Amerika semakin berkuasa karena runtuhnya Uni Soviet sehingga membuat Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya (portalgaruda.org, diakses pada 12 Oktober 2019). Runtuhnya Uni Soviet dianggap sebagai kemenangan hasil Gagasan strategi besar AS saat ini berputar di sekitar kebijakan pembatasan luar negeri Amerika era perang dingin (George Keenan), yang berusaha mencegah pengaruh Russia dan memperkuat dunia non-komunis. Kini AS dengan leluasa mengeluarkan kebijakan luar negerinya dan turut campur tangan dalam berbagai urusan eksternal seperti

kebijakan russia yang mendukung Nicholas Maduro di Venezuela maupun internal seperti krisis politik di Venezuela.

Tekanan Amerika Serikat tidak hanya terhadap Venezuela melalui dewan keamanan PBB agar patuh terhadap resolusi yang dikeluarkan AS, terlebih AS menginginkan iran untuk transparan dalam bekerjasama dengan IEA terkait nuklir dan mengacu panasnya hubungan AS dengan Iran. (Setiawan, Yani, 2019). Salah satu negara yang kerap mendapatkan sanksi dari kebijakan luar negeri AS ialah Venezuela, karena AS menganggap kepemimpinan Presiden Venezuela seafiliasi dengan *rival* AS seperti Rusia. Benturan-benturan politik antara kedua negara ini terjadi terus-menerus dan memburuk sejak tahun 1999 dimana pemerintahan dipegang oleh mantan Presiden Venezuela, Hugo Chavez. Venezuela sering menuduh Amerika melakukan sabotase untuk menggulingkan pemerintah Caracas, menghancurkan prestasi dari revolusi Bolivar. Amerika dituduh memfitnah Venezuela sebagai negara pedagang narkoba dan pelanggar hak asasi manusia. Setelah Hugo Chavez meninggal dunia, revolusi Bolivar dilanjutkan oleh pemerintahan Maduro dan menimbulkan berbagai masalah baru bagi Venezuela (vovworld.vn, diakses pada 15 Desember 2019).

Pada tahun 2002, Amerika Serikat melakukan sebuah percobaan kudeta terhadap Hugo Chavez. Amerika terus menunjukkan permusuhannya terhadap Venezuela yang diakibatkan karena Amerika Serikat menilai bahwa kebijakan Chavez telah memberikan kerugian terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Salah satunya pada tahun 2008 Chavez menasionalisasikan pabrik-pabrik seperti semen dan baja, dan juga sebagian perusahaan yang mendistribusikan susu

dan daging (qureta.com, diakses pada 13 Oktober 2019). Chavez juga menasionalisasikan aset yang berkaitan dengan minyak termasuk aset milik perusahaan jasa minyak Amerika Serikat, bahan kimia, pariwisata, agrobisnis termasuk padi olahan milik perusahaan Amerika Serikat, ritel, dan industri perbankan. Pada masa jabatannya, presiden Chavez memutuskan untuk memindahkan semua aset cadangan internasional Venezuela yang di simpan di lembaga keuangan Amerika Serikat dan Eropa.

Di tahun 2013 setelah meninggalnya Presiden Chavez dan kepemimpinan digantikan oleh Nicholas Maduro, Akan tetapi Era kepresidenan Maduro ditandai dengan banyak pertanyaan bukan hanya mengenai keadilan dari pelaksanaan kampanye, tetapi juga tentang hasil resmi dari pemilu tersebut. Maduro nyaris tidak memenangkan pemilihan khusus untuk menggantikan posisi Chavez sebagai Presiden. Maduro hanya memenangkan 50,6% suara. Legitimasi Nicholas Maduro semakin merosot pada pertengahan 2014 ketika harga minyak, yang dapat bervariasi dari 20 hingga 40% dari PDB setiap tahunnya, jatuh, dari sebesar AS\$130 dolar menjadi \$30 per barel pada akhir 2015. (Rufinaldo, R. C. (2019). Timeline: Krisis Politik venezuela. 2-3)

Intervensi yang dilakukan di Venezuela akan menimbulkan perubahan besar bagi Amerika dalam bidang perekonomian. Apalagi jika Amerika dapat meminta perusahaan minyaknya berinvestasi dan menghasilkan sumber daya minyak di Venezuela. Hal ini berarti, intervensi yang dilakukan oleh Presiden Trump ini mengalahkan kepercayaan dan penghormatan terhadap demokrasi demi kepentingan ekonomi semata (Asrudin Azwar dalam qureta.com 2019, diakses

pada 2 Januari 2020). Dengan demikian, Kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari kebijakan luar negeri ialah untuk memperoleh keuntungan dari luar agar dapat memenuhi kepentingan dalam negeri. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri adalah perwujudan dari kepentingan nasional suatu negara, yang mana tujuan dan sasaran yang ingin dicapai akan selalu berpatokan pada apa yang menjadi kebutuhan dalam negerinya. Kebutuhan tersebut misalnya kebutuhan politik dan keamanan, sosial budaya juga ekonomi. Negara Amerika Serikat merupakan sebuah negara besar, untuk itu Amerika Serikat mempunyai sebuah kebijakan yang mempunyai nilai besar dalam politik internasional.

Menurut laporan Badan Pengungsi PBB, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) menyatakan bahwa sebanyak empat juta masyarakat Venezuela pergi meninggalkan negara tersebut sejak tahun 2015 (Rhany Chairunnisa, 2019). Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ternyata mempunyai keyakinan yang sama dengan ketiga pendahulunya. Ia meyakini bahwa jalan terbaik dalam kebijakan luar negeri Amerika menyangkut persoalan Venezuela adalah menggulingkan rezim Maduro yang dinilai otoriter dan memberikan dukungan kepada tokoh oposisi Juan Guaido yang dinilai moderat dan demokratis.. Oleh karenanya, Presiden Trump melancarkan kebijakan perang ekonomi atau embargo ekonomi total terhadap Venezuela (Tommy Kurnia dala liputan6.com, diakses pada 5 Januari 2020). Kebijakan Embargo tersebut dilakukan dengan membekukan aset pemerintah Venezuela dan entitas terkait serta melarang transaksi ekonomi dengannya kecuali dengan alasan khusus.

Pengecualian tersebut mencakup bisnis resmi pemerintah federal dan transaksi yang terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan.

Keputusan ini berdasarkan perintah eksekutif (*executive order*). Sanksi akan menimpa seluruh individu atau perusahaan, baik perusahaan asing atau asal AS, yang berbisnis atau memberi dukungan bagi siapa pun yang terafiliasi dengan pemerintahan Nicolás Maduro. Sebelumnya Sejak awal krisis politik Venezuela tahun 2019, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 100 individu dan entitas, termasuk perusahaan minyak milik negara *Petróleos de Venezuela SA*, Bank Pembangunan Venezuela, dan bank sentral Venezuela (matamatapolitik.com 2019, diakses pada 8 Januari 2020).

Langkah baru itu mengancam akan menargetkan dan menjatuhkan sanksi pada hampir semua perusahaan atau individu, milik asing maupun Amerika Serikat, yang terlibat dalam bisnis atau menawarkan dukungan kepada siapa pun yang berafiliasi dengan pemerintah Maduro, Langkah itu tidak dirancang untuk menargetkan rakyat Venezuela, termasuk akses mereka ke transfer uang (matamatapolitik.com 2019, diakses pada 8 Januari 2020).

Amerika Serikat telah memberlakukan puluhan undang-undang sanksi, peraturan, dan perintah eksekutif, yang dikelola oleh berbagai lembaga pemerintah. Beberapa di antaranya melibatkan sanksi selektif, sementara yang lain lebih komprehensif. Sanksi Amerika Serikat yang berlaku telah membantu mempercepat keruntuhan produksi minyak negara itu dan berakibat pada pasar

energi global. Dengan ini, Venezuela sudah satu level dengan Korea Utara, Iran, Suriah, dan Kuba yang mendapat sanksi serupa.

Semenjak memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika dan mengharuskan semua pegawai kedutaan Amerika meninggalkan Venezuela dalam waktu 72 jam. Hal itu dikatakan oleh Presiden Nicolas Maduro beberapa jam setelah Presiden Donald Trump secara resmi mengakui Juan Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela, namun Kebijakan Amerika Serikat menolak pemutusan hubungan diplomatik tersebut dan menyampaikan peringatan keras kepada Maduro.

Meski kebijakan Amerika ini telah membuat Venezuela mengalami inflasi yang tinggi, kekurangan pangan, obat-obatan, dan membuat lebih dari empat juta penduduknya melarikan diri dari Venezuela karena kesulitan ekonomi, namun Amerika Serikat memberikan bantuan obat-obatan, makanan, dan juga bantuan dana sebesar \$60 juta dollar kepada kubu oposisi dan rakyat Venezuela yang berjudul bantuan kemanusiaan diumumkan oleh Mike Pence dalam pertemuan di PBB Agustus 2019 lalu, akan tetapi sikap Maduro terhadap Amerika Serikat tetaplah sinis Dan Nicholas Maduro juga menolak bantuan dari luar negeri dengan menutup jalur perbatasan dan memperketat penjagaan di perbatasan dengan menambah 300 tentara pada jalur-jalur perbatasan. Karena itulah, Presiden Trump ingin melakukan intervensi di Venezuela untuk menggulingkan Maduro dan mendukung oposisi Guaido.

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era kepemimpinan Presiden Donald Trump juga dapat berdampak bisa baik atau buruk terhadap sektor ekonomi atau kepercayaan publik kepada Amerika. Meskipun banyak yang mengkritik dalam dua tahun kepemimpinan Donald Trump, masih ada kebingungan tentang apa tepatnya kebijakan luar negerinya. Namun, apa pun reaksi yang ditimbulkan, faktanya adalah ia juga menyampaikan sejumlah pidato yang dengan jelas menjabarkan pendekatannya terhadap dunia secara mendasar dan mendetil. Kebijakan luar negeri Trump tidak mudah untuk digolongkan ke dalam berbagai kategori tersebut, meskipun jelas mengandung unsur dari semua kategori. Namun Trump memang memiliki kebijakan luar negeri yang konsisten: Doktrin Trump. Administrasi Trump menyebutnya sebagai “realisme berprinsip.” Demi mencapai Kepentingan nasionalnya, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan luar negerinya dengan cara intervensi dan mendukung penuh Juan Guaido. Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih memperjelas lagi mengenai kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat di Venezuela.

Penelitian pertama tentang intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Venezuela yaitu salah satunya merupakan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang telah dilakukan oleh Benardy Ferdiansyah dengan penelitian yang berjudul Kebijakan Hugo Chavez di Venezuela Dalam Melawan Hegemoni Amerika Serikat (2002-2005) yang dibuat pada tahun 2011 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini berisi tentang perlawanan yang dilakukan oleh Hugo Chavez terhadap George Bush Jr. sehingga membuat hubungan kedua negara jadi renggang. Hal ini dikarenakan oleh kebijakan Hugo

Chavez yang berani menentang kepentingan Amerika Serikat. Kebijakan Chavez ini didasarkan pada dasar-dasar politik luar negeri Venezuela yang Non-Blok. Dasar-dasar politik luar negeri tersebut mencerminkan Venezuela yang anti kolonialisme dan imperialisme dan telah ditunjukkan dengan politik luar negeri anti Amerika Serikat, sebagai negara imperialisme utama. Kegagalan program IMF di Venezuela yang dilakukan oleh Amerika Serikat membuat kebijakan luar negeri Chavez berani menentang kepentingan-kepentingan Amerika Serikat.

Penelitian kedua yaitu karya T. Zulfikar dengan penelitian yang berjudul Politik Luar Negeri Venezuela Terhadap Amerika Serikat Pasca Hugo Chavez yang dibuat pada tahun 2016 di Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penelitian tersebut, peneliti meneliti tentang bagaimana politik luar negeri Venezuela setelah kepemimpinan Hugo Chavez digantikan oleh Nicolas Maduro yang diprediksi akan memberikan kemunduran yang cukup besar bagi Venezuela yang selama ini telah populer mempertahankan sebuah formula baru yaitu Sosialisme abad ke-21. Namun fenomena yang terjadi telah memberikan jawaban berbeda bagi para peramal keilmuan hubungan internasional yang menganggap presiden Venezuela yang baru, yang kurang berpengalaman akan mudah diarahkan oleh AS ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu. Hasilnya tentu Maduro menunjukkan sikap terus bertahan bahkan melakukan kebijakan-kebijakannya menghadapi Amerika Serikat.

Penelitian terdahulu ketiga adalah karya Soraya Hartini Baun yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Venezuela Di Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama (2009-2012) yang di buat pada tahun 2013

di UPN “Veteran” Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dengan kebijakan Presiden Barack Obama terhadap Venezuela. Pada tahun 2009 di masa awal pemerintahan presiden Barack Obama, AS dan Venezuela memperlihatkan hubungan yang lebih baik, namun seiring berjalannya waktu, strategi AS dalam menjalankan hubungan dengan Venezuela mulai mengalami pergeseran dimana Obama mulai bersikap tegas terhadap sikap-sikap Chavez yang dianggap selalu menentang segala kebijakan AS. Persamaan penelitian-penelitian diatas adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela namun terdapat perbedaan yaitu pada masa pemerintahan dan tahun pelaksanaannya. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulunya adalah perbedaan system pemerintahan Amerika Serikat dan di Venezuela.

Penelitian terdahulu keempat adalah karya Arga Andreas yang berjudul “Idiosyncratic Presiden Hugo Chavez dalam Kebijakan Luar Negeri Venezuela Terhadap Amerika Serikat (2002-2013)”, yang di buat pada tahun 2019 di UNIKOM Bandung. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara Idiosyncratic dengan kebijakan Luar Negeri Presiden Hugo Chavez terhadap Amerika Serikat. Saat dipimpin oleh Presiden Hugo Chavez pada tahun 2002 – 2013, di mana Hugo Chavez membuat perubahan total pada jenis kebijakan luar negeri Venezuela terhadap Amerika Serikat. Di mana saat Venezuela dipimpin oleh Carlos Andrez Perez, presiden sebelumnya, Venezuela hanya menjadi boneka dan sapi perah bagi Amerika Serikat. Dikarenakan Veneuela memiliki cadangan minyak bumi yang terbesar di dunia, hasil

perkebunan yang melimpah, serta buruh yang murah. Persamaan penelitian-penelitian diatas adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela namun terdapat perbedaan yaitu meneliti pada faktor idiosyncratic dalam merubah kebijakan luar negeri Venezuela terhadap Amerika Serikat, Perbedaan lainnya pada masa pemerintahan dan tahun pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul: **“Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Krisis Politik Venezuela tahun 2018”**

Penelitian ini dibuat berdasarkan mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu:

1. Hubungan Internasional di Amerika

Matakuliah ini membantu peneliti dalam menjelaskan tentang profil Amerika Serikat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Terutama tentang Kebijakan Luar Negeri AS yang di ambil dalam menanggapi Krisis Politik dan Ekonomi di Venezuela.

2. Dinamika Politik Internasional

Mata kuliah ini membantu penulis dalam menjelaskan mengenai Dinamika Politik antar negara, yang mempengaruhi Kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lainnya.

3. Analisis Politik Luar Negeri

Mata kuliah ini menjelaskan mengenai politik luar negeri suatu negara, termasuk respon dan kebijakan yang terkandung di dalamnya, serta berbagai

tindakan yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan terhadap lingkungan eksternalnya. Dalam hal ini, mata kuliah ini dapat membantu penulis menjelaskan mengenai bagaimana respon Amerika Serikat terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri Venezuela pada saat masa pemerintahan Presiden Hugo Chavez dan Nicholas Maduro.

4. Hukum internasional

Mata Kuliah ini menjelaskan mengenai bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Mata kuliah ini dapat membantu penulis menjelaskan hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Dan juga mata kuliah ini membantu penulis dalam hal prinsip intervensi yang dilakukan terhadap negara yang gagal dalam menjalankan sistem pemerintahan atau krisis politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat diambil perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana kebijakan luar negeri yang diambil oleh Amerika Serikat dalam menyikapi krisis politik yang terjadi di Venezuela pada tahun 2018?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa kepentingan Amerika Serikat untuk terlibat dalam krisis politik di Venezuela ?
2. Apa saja kebijakan Amerika Serikat dalam menyikapi krisis politik di Venezuela?

3. Bagaimana respon Venezuela atas Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam krisis politik di Venezuela?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Krisis politik yang dialami oleh Venezuela saat ini bukan hanya merupakan konflik antara Nicolas Maduro dengan Juan Guaido saja, tetapi sudah banyak aktor lain yang turut meramaikan krisis tersebut. Sebut saja Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang ikut mencampurtangani urusan internal Venezuela. Krisis politik ini mulai memuncak ketika Guaido tidak terima atas terpilihnya kembali Maduro sebagai Kepala Negara atau Presiden terpilih Venezuela pada Mei 2018.

Agar penelitian ini menjadi lebih jelas dan ter-struktur, maka peneliti akan membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Venezuela dalam upayanya menggulingkan pemerintahan Maduro setelah terpilih kembali sebagai presiden Venezuela, dan untuk mencari tahu kepentingan dari Amerika Serikat sehingga turut mencampurtangani masalah internal Venezuela.

1.3 Maksud dan tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud agar peneliti dan pembaca penelitian ini dapat mengetahui kepentingan apa yang dimiliki oleh

Amerika Serikat sehingga mencampurtangani krisis politik yang terjadi di Venezuela tahun 2018.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui, memahami, dan menganalisa apa saja kepentingan nasional Amerika Serikat dengan keikutsertaanya dalam krisis politik di Venezuela.
2. Untuk dapat mengetahui, memahami, dan menganalisa apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Venezuela
3. Untuk dapat mengetahui, memahami, dan menganalisa sikap yang diberikan oleh Venezuela terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menyikapi krisis politik di Venezuela.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti berharap agar penelitian ini memiliki guna yang tentunya dibagi kedalam dua bagian, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan informasi dalam studi-studi Ilmu Hubungan Internasional, juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi penstudi masalah-masalah hubungan internasional khususnya

mengenai politik luar negeri suatu negara dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topic yang peneliti uraikan diatas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah data-data empiris, ilmu, dan rekomendasi bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Venezuela dan pengaruhnya terhadap Venezuela. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional. Juga bagi lembaga akademik peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini dapat berguna untuk bahan referensi bagi para penstudi hubungan internasional dan juga untuk umum.

